

IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI DI DESA SANGATTA UTARA TAHUN 2014

Siti Mubarqah¹

Abstrak

Siti Mubarqah, Implementasi Program Pembangunan Rumah Layak Huni di Desa Sangatta Utara Tahun 2014), di bawah bimbingan Bapak Drs. H. Muhammad Noor, M.Si selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Melati Dama, S.Sos, M.Si selaku Dosen Pembimbing II.

Penelitian Skripsi ini berlokasi di Kantor Bapemas Sangatta. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan sejauh mana Implementasi Program Pembangunan Rumah Layak Huni di Desa Sangatta Utara. Fokus penelitian dalam penelitian ini terdiri dari unsur pelaksana, program yang dilaksanakan dan kelompok sasaran serta faktor yang menghambat Implementasi Program Pembangunan Rumah Layak Huni di Desa Sangatta Utara.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan informan diambil secara purposive sampling. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan akan di analisis secara kualitatif.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa Implementasi Program Pembangunan Rumah Layak Huni di Desa Sangatta Utara Tahun 2014 hasilnya cukup baik dengan melalui proses panjang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan yang dilakukan oleh pelaku di desa, kecamatan hingga kabupaten dan masyarakat penerima manfaat. Dengan adanya perubahan yang signifikan dari rumah masyarakat penerima manfaat adanya Program Pembangunan Rumah Layak Huni Tahun 2014.

Kata Kunci : *Implementasi, Pembangunan, Rumah Layak Huni.*

PENDAHULUAN

Berdasarkan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, program pengentasan kemiskinan merupakan suatu usaha dari pemerintah dalam meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat serta kapasitas pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat dalam menanggulangi masalah kemiskinan di wilayah tersebut

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: mubarqahsiti@gmail.com

Kemiskinan itu sendiri adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.

Konsep yang tepat untuk melaksanakan program pengentasan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat pemerintah menetapkan otonomi daerah yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat 5 tentang pemerintahan daerah dimana setiap daerah diberi hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat termasuk dalam mengatasi masalah kemiskinan.

Sebagai acuan penanggulangan kemiskinan dengan ini pemerintah membuat program yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat yang disebut dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri). Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri ini adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi.

Dalam PNPM Mandiri Perdesaan seluruh anggota masyarakat didorong untuk terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana sesuai kebutuhan paling prioritas di desanya, sampai pada pelaksanaan kegiatan dan pelestariannya.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Rumah Layak Huni. Hal ini sejalan dan mengacu pada mekanisme pelaksanaan PNPM Mandiri karena salah satu kebutuhan primer bagi manusia adalah terpenuhinya kebutuhan akan tempat tinggal (rumah) yang layak dan sehat. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam peningkatan kualitas rumah tempat tinggal. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menetapkan kebijakan untuk melakukan pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat perdesaan yang dikategorikan masyarakat kurang mampu ditinjau dari kondisi fisik bangunan yang sudah tidak layak huni.

Rumah tidak layak huni adalah suatu hunian atau tempat tinggal yang tidak layak huni karena tidak memenuhi persyaratan untuk hunian baik secara teknis maupun non teknis. Rumah tidak layak huni ini dapat dikatakan sebagai pengejawantahan dari kemiskinan, karena pada umumnya rumah tak layak huni ini erat kaitannya dengan pemukiman kumuh.

Kenyataannya, untuk mewujudkan rumah yang memenuhi persyaratan tersebut bukanlah hal yang mudah. Ketidakberdayaan mereka memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni berbanding lurus dengan pendapatan dan pengetahuan tentang fungsi rumah itu sendiri. Pemberdayaan masyarakat miskin juga mencakup upaya program bantuan rumah tidak layak huni, demikian juga persoalan sarana prasarana lingkungan yang kurang memadai dapat menghambat tercapainya kesejahteraan suatu komunitas. Lingkungan yang kumuh atau sarana prasarana lingkungan yang minim dapat menyebabkan masalah sosial dan kesehatan.

Dengan melihat permasalahan diatas ini Desa Sangatta Utara menjadi salah satu lokasi yang menjadi penerima manfaat pembangunan rumah layak huni. Desa Sangatta Utara merupakan suatu Desa yang berada di lingkup kota Kabupaten Kutai Timur dan berada pada wilayah kecamatan Sangatta Utara dan merupakan ibu kota Kabupaten Kutai Timur. Dilihat dari kondisi ekonomi masyarakat mempunyai berbagai macam sumber mata pencaharian dari pegawai negeri, karyawan swasta, pedagang, buruh dan adapula yang tidak memiliki sumber mata pencaharian (pengangguran).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis ingin mengetahui dan memahami lebih dalam mengenai bagaimana “Implementasi Program Pembangunan Rumah Layak Huni di Desa Sangatta Utara Tahun 2014”

KERANGKA DASAR TEORI

Implementasi Kebijakan

Implementasi

Implementasi merupakan suatu bentuk intervensi atau tindakan tertentu dari pemerintah yang dirancang untuk mencapai suatu hasil yang diharapkan. Ripley dan Franklin dalam Winarno (2008:145) implementasi adalah apa yang terjadi setelah Undang-Undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan atau suatu jenis keluaran yang nyata.

Sementara Mazmanian dan Sebatier dalam Nawawi (2009:131) implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasa dalam bentuk Undang-Undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya.

Kebijakan

Kebijakan menurut pendapat Carl Friedrich dalam Wahab (2001:3) Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Sedangkan menurut Jones (1991:46) kata kebijakan sering digunakan dan diperuntukan maknanya dengan tujuan program, keputusan, hukum, proposal, patokan, dan maksud besar tertentu. Selanjutnya Jones mendefinisikan kebijakan adalah keputusan tetap yang dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut.

Implementasi Kebijakan

Menurut Udoji dalam Agustino (2006:154) berpendapat bahwa implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses kebijakan. Artinya implementasi kebijakan menentukan keberhasilan suatu proses kebijakan dimana tujuan serta dampak kebijakan dapat dihasilkan. Sementara itu Van Meter dan Van Horn dalam Budi Winarno (2005:102) mengemukakan “implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya”.

Dalam penentuan untuk mencapai keberhasilan suatu implementasi kebijakan Tachjan (2006:26) menjelaskan tentang unsur-unsur dari implementasi kebijakan yang mutlak harus ada yakni unsur pelaksana, adanya program yang dilaksanakan serta, kelompok sasaran.

Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Moh. Ali Aziz (2005:136) Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses di mana masyarakat, khususnya mereka yang kurang memiliki akses ke sumber daya pembangunan, didorong untuk meningkatkan kemandiriannya di dalam mengembangkan perikehidupan mereka. Pemberdayaan masyarakat juga merupakan proses siklus terus-menerus, proses partisipatif di mana anggota masyarakat bekerja sama dalam kelompok formal maupun informal untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman serta berusaha mencapai tujuan bersama. Jadi, pemberdayaan masyarakat lebih merupakan suatu proses.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri adalah program nasional penanggulangan kemiskinan terutama yang berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat.

PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.

Upaya lain pula yang dilakukan yakni melalui pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan atau meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya

peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.

PNPM Mandiri Perdesaan

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan atau PNPM-Perdesaan atau PNPM-Rural) merupakan salah satu program pemberdayaan masyarakat yang mendukung PNPM Mandiri yang wilayah kerja dan target sarasannya adalah masyarakat perdesaan yang berdasar pada UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. PNPM Mandiri Perdesaan mengadopsi sepenuhnya mekanisme dan prosedur Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang telah dilaksanakan sejak 1998-2007.

PNPM Mandiri Perdesaan ini sebagai salah satu program pemberdayaan masyarakat yang dalam pelaksanaannya, program ini memprioritaskan kegiatan bidang infrastruktur desa, pengelolaan dana bergulir bagi kelompok perempuan, kegiatan pendidikan, perumahan dan kesehatan bagi masyarakat di wilayah perdesaan. Program ini terdiri dari tiga komponen utama, yaitu, dana BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) untuk kegiatan pembangunan, Dana Operasional Kegiatan (DOK) untuk kegiatan perencanaan pembangunan partisipatif dan kegiatan pelatihan masyarakat (*capacity building*) serta pendampingan masyarakat yang dilakukan oleh para fasilitator pemberdayaan, fasilitator teknik dan fasilitator keuangan.

Pembangunan Rumah Layak Huni

Di dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan terdapat program pembangunan rumah layak huni. Hal ini sejalan dan mengacu pada mekanisme pelaksanaan PNPM Mandiri karena salah satu kebutuhan primer bagi manusia adalah terpenuhinya kebutuhan akan tempat tinggal (rumah) yang layak dan sehat. Pembangunan Rumah Layak Huni memfokuskan penedekatan pelaksanaan pada prinsip-prinsip PNPM-MPd yaitu pembangunan partisipatif, transparan, sederhana dan akuntabel.

Strategi PNPM-MPd untuk pembangunan Rumah Layak Huni masyarakat perdesaan akan dilakukan dengan mendorong dan memberikan bantuan berupa Dana Bantuan Langsung Masyarakat dan Tenaga konsultan pendamping. Pelaksanaan kegiatan yang berbasis masyarakat diutamakan secara swakelola dan padat karya yang menjadi prioritas dengan tujuan gotong royong agar bisa tetap terjaga sekaligus masyarakat dapat memperoleh pendapatan. Dana dari program yang diterima anggota masyarakat sebagai upah kerja atau transaksi bahan material dan lain-lain, diharapkan sekaligus memicu produksi dan konsumsi bagi pemulihan ekonomi masyarakat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada pembahasan ini penulis akan membahas hasil-hasil penelitian yang diperoleh dari lokasi penelitian. Pada sub-bab pembahasan ini berisi rangkaian dari suatu penelitian ilmiah untuk mengetahui gambaran yang terjadi.

Implementasi Program Pembangunan Rumah Layak Huni di Desa Sangatta Utara Tahun 2014.

1. Unsur Pelaksana

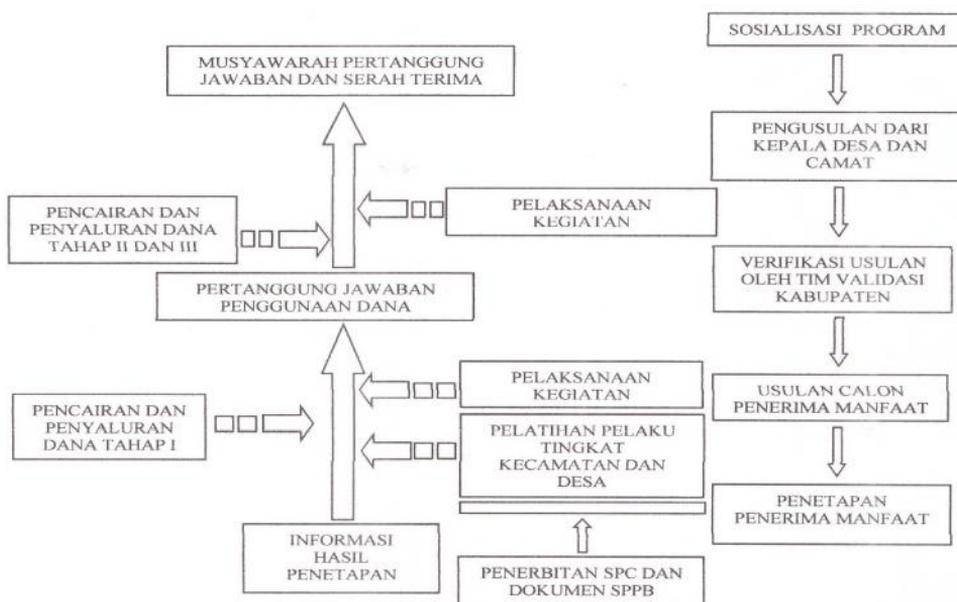
Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan pada unsur pelaksana Program Pembangunan Rumah Layak Huni di Desa Sangatta Utara Tahun 2014. Unsur pelaksana adalah implementor kebijakan atau pelaksana kebijakan yang menjalankan kebijakan yang terdiri dari penentuan tujuan dan sasaran organisasional, analisis serta perumusan kebijakan dan strategi organisasi, pengambilan keputusan, perencanaan, penyusunan program, pengorganisasian, penggerakkan manusia, pelaksanaan operasional, pengawasan serta penilaian.



Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan pelaku-pelaku yang ada di desa, kecamatan dan kabupaten serta masyarakat penerima manfaat telah melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik walaupun ada oknum tertentu yang tidak sesuai melaksanakan tugasnya dengan ketentuan yang ada.

2. Program Yang Dilaksanakan

Program yang dilaksanakan ialah serangkaian kegiatan yang diarahkan untuk menempatkan program yang berlaku. Program yang dilaksanakan ialah Program Pembangunan Rumah Layak Huni di Desa Sangatta Utara Tahun 2014. Lebih jelasnya mengenai alur kegiatan Pembangunan Rumah Layak Huni dapat dilihat pada gambar berikut :



Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa program yang dilaksanakan yakni Program Pembangunan Rumah Layak huni di Desa Sangatta Utara Tahun 2014 berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dalam proses pelaksanaan berlangsung dapat dikategorikan berjalan dengan baik dengan jumlah penerima 23 kepala keluarga. Dalam penyelesaian pembangunan rumah walaupun lewat dari target yang telah direncanakan yakni penyelesaian seharusnya di bulan Oktober 2014 namun kenyataannya selesai pada bulan Februari 2015 namun hasilnya sesuai dengan desain gambar yang telah ada.

3. Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran adalah sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang akan menerima barang atau jasa. Kelompok sasaran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah masyarakat penerima manfaat Program Pembangunan Rumah Layak Huni di desa Sangatta Utara Tahun 2014.

Untuk mengetahui siapa saja yang menjadi penerima manfaat Program Pembangunan Rumah Layak Huni di Desa Sangatta Utara Tahun 2014 berikut adalah daftar nama-nama penerima manfaat :

| No | NAMA | ALAMAT |
|-----|-----------------|---|
| 1. | Ardan | Gg. Rudina RT. 16 |
| 2. | Arifin | Gg. Rawa Indah VI RT. 11 |
| 3. | Eduwar | Gg. Rawa Indah RT. 11 |
| 4. | Fatima | Jl. Durian II RT. 06 |
| 5. | Hafizi | Jl. Majai RT. 044 |
| 6. | Hani | Jl. Pendidikan |
| 7. | Hamsidar | Jl. APT. Pranoto gg. Nita |
| 8. | Heri Purwanto | Jl. Karya Etam |
| 9. | Imam Mursyid | Rudina dalam gg. Danau Arang |
| 10. | Kaldek | Gg. Rawa Indah I RT. 11 |
| 11. | Kasma | Jl. Assadiyah RT. 13 |
| 12. | Kowiati | Jl. Yos Sudarso RT. 02 |
| 13. | Muliono | Jl. APT. Pranoto gg. Kuda Kaltim RT. 10 |
| 14. | Rahmat Saji | Jl. APT. Pranoto gg. Teratai RT. 38 |
| 15. | Rahol Sutiyanan | Jl. Diponegoro gg. Taruna RT. 10 |
| 16. | Rusman | Jl. Sepakat gg. Samujianto RT. 17 |
| 17. | Salimun | Jl. Assadiyah RT. 13 |
| 18. | Sarmansyah | Jl. APT. Pranoto gg. Teratai RT. 38 |
| 19. | Siti Khadijah | Jl. Kalimutu RT. 15 |
| 20. | Sumanto | Gg. Mujur Jaya RT. 37 |
| 21. | Supaini | Jl. Pendidikan RT.32 |
| 22. | Supono | Gg. Kedung Adem RT. 15 |
| 23. | Suwandi | Gg. Rawa Indah RT. 11 |

Dengan adanya program Pembangunan Rumah Layak Huni yang ada di Desa Sangatta Utara Tahun 2014 masyarakat dapat terbantu dan dapat dibandingkan secara signifikan bahwa dari sebelum dan sesudah perbaikan rumah adanya perbedaan dari bahan/material yang digunakan sudah berkualitas baik, adanya pembagian ruangan seperti terdapat teras rumah, ruang tamu, 2 kamar tidur, dapur dan kamar mandi serta wc adapula tambahan lain yakni penerima manfaat juga mendapatkan tandon sebagai wadah penyimpanan air, sehingga air yang ditampung akan tetap bersih dan sehat.

Dengan adanya Program Pembangunan Rumah Layak Huni di Desa Sangatta Utara Tahun 2014 ini, masyarakat juga dapat lebih mandiri seperti pada tujuan umum yakni meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan. Sesuai dengan hasil pengamatan oleh penulis masyarakat membuat usaha kecil dirumah seperti menjual makanan dan minuman untuk anak-anak disekitar lingkungan rumah.

Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Program Pembangunan Rumah Layak Huni di Desa Sangatta Utara Tahun 2014 :

Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Program Pembangunan Rumah Layak Huni di Desa Sangatta Utara Tahun 2014. Faktor tersebut ada yang mendukung dan menghambat Implementasi Program Pembangunan Rumah Layak Huni di Desa Sangatta Utara Tahun 2014.

1. Faktor-faktor yang mendukung Implementasi Program Pembangunan Rumah Layak Huni adalah :

Faktor pertama yakni berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa dengan adanya ketersediaan anggaran yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah untuk Implementasi Program Pembangunan Rumah Layak Huni di Desa Sangatta Utara Tahun 2014 yang telah di spesifikasikan dalam Rencana Anggaran Biaya dengan hal tersebut memperlancar proses pelaksanaan kegiatan dan menjadi pendukung

Faktor kedua ialah swadaya masyarakat juga merupakan faktor pendukung dalam Implementasi Pembangunan Rumah Layak Huni di Desa Sangatta Utara Tahun 2014, karena dalam proses pembangunan rumah, masyarakat juga ikut andil atau dengan kata lain yakni swadaya masyarakat.

2. Faktor-faktor yang menghambat Implementasi Pembangunan Rumah Layak Huni adalah :

Faktor penghambat pertama ialah keberadaan kayu yang langka sangat berperan penting dalam Implementasi Pembangunan Rumah Layak Huni karena dalam pembangunan rumah diperlukan bahan atau material kayu sebagai pondasi bangunan rumah. Seperti yang kita tahu sekarang bahwa keberadaan kayu sudah sangat langka.

Faktor penghambat yang kedua yakni berdasarkan penelitian yang dilakukan juga diketahui bahwa ada pemasok kayu ilegal yang tertangkap polisi, sehingga ini mempersulit untuk pemasokan kayu kepada kelompok perumahan yang akan membangun rumah.

Faktor penghambat yang ketiga ialah cuaca yang buruk (hujan) yang menghambat pelaksanaan pembangunan rumah karena apabila hujan datang maka tenaga kerja pertukangan tidak dapat membangun atau melakukan kegiatan pembangunan rumah. Pengerjaan rumah yang semula ditargetkan akan selesai dalam waktu 3 bulan tidak tercapai hingga waktu pengerjaan 6 bulan dikarenakan terhalang oleh cuaca yang buruk.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Program Pembangunan Rumah Layak Huni di Desa Sangatta Utara Tahun 2014. Untuk lebih jelasnya, seperti yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, maka dalam penulisan ini dapat ditarik kesimpulan dari setiap fokus penelitian sebagai berikut :

1. Sesuai dengan hasil penelitian di lapangan Implementasi Program Pembangunan Rumah Layak Huni di Desa Sangatta Utara Tahun 2014 sudah berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan Pemerintah dalam rangka memberikan bantuan perbaikan rumah kepada keluarga miskin guna terpenuhinya peningkatan kualitas akan tempat tinggal (rumah) menjadi layak dan sehat.
2. Unsur pelaksana dalam penelitian ini sudah menjalankan tugas dan peranannya. Hal ini dapat dilihat dari mekanisme atau alur kebijakan yang dijalankan oleh unsur pelaksana yakni pelaku-pelaku kegiatan mulai dari desa, kecamatan, hingga kabupaten dalam hal membantu perencanaan, fasilitator, pembimbing dan pembina program pembangunan rumah layak huni sehingga apa yang menjadi tujuan, prosedur dan mekanisme walaupun dalam pelaksanaannya ada oknum dalam pelaku kegiatan yang kurang baik dalam menjalankan tugasnya.
3. Program yang dilaksanakan ialah Program Pembangunan Rumah Layak Huni di Desa Sangatta Utara Tahun 2014. Dalam proses pelaksanaan berlangsung dapat dikategorikan berjalan dengan baik dengan jumlah penerima 23 kepala keluarga. Dalam penyelesaian pembangunan rumah walaupun lewat dari target yang telah direncanakan yakni penyelesaian seharusnya di bulan Oktober 2014 namun kenyataannya selesai pada bulan Februari 2015 namun hasilnya sesuai dengan desain gambar yang telah ada.
4. Kelompok sasaran dari program ini ialah masyarakat kurang mampu dapat dilihat dari rumah yang tidak layak untuk dihuni dari segi bangunan rumah yang terbuat dari kayu-kayu yang tidak layak pakai, pembagian ruangan rumah yang tidak sesuai dan MCK yang kurang sehat. Maka setelah adanya program bantuan dari pemerintah dapat dilihat secara signifikan perbedaan antara rumah sebelum dan sesudahnya.
5. Faktor-faktor pendukung dalam Implementasi Program Pembangunan Rumah Layak Huni adalah ketersediaan anggaran dan swadaya masyarakat. Sementara faktor-faktor penghambat dalam Implementasi Program Pembangunan Rumah Layak Huni adalah kelangkaan kayu, pemasok kayu ilegal dan cuaca buruk (hujan).

Saran

Adapun saran yang dapat diberikan penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Dikarenakan faktor penghambat ialah susahnya pengadaan bahan/material kayu. Langkah-langkah yang dapat ialah mencari bahan/material lain seperti batu atau beton yang lebih mudah untuk dipersiapkan, karena bahan/material yang mudah dipersiapkan akan memperlancar atau mempercepat pengerjaan pembangunan rumah.
2. Dikarenakan faktor penghambat dalam proses pembangunan rumah ialah pemasok kayu yang ilegal maka langkah-langkah yang dapat ditempuh ialah adanya kesepakatan antara pelaksana Program Pembangunan Rumah Layak

Huni dengan pihak kepolisian dengan membuat surat jalan untuk para pemasok kayu agar perjalanan mereka berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan.

3. Dikarenakan cuaca buruk yang menjadi faktor penghambat karena pembangunan akan berjalan lambat dan tidak tepat waktu. Untuk itu bisa ditanggulangi dengan menambah tenaga pertukangan sehingga apabila cuaca sedang mendukung para tukang bisa dengan cepat melakukan pembangunan.

Daftar Pustaka

Sumber Buku :

- Agustino, Leo, 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Penerbit Alfabeta, Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta : Jakarta
- Bayo, Andre, Drs, 1996. *Kemiskinan dan Strategi Memerangi Kemiskinan*, Penerbit LYBERTY, Yogyakarta.
- Jones, Charles O, 1991. *Pengantar Kebijakan Publik*, Rajawali Press, Jakarta.
- Nawawi, Ismail, 2009. *Public Policy Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. PT Putra Media Nusantara, Surabaya.
- Wahab, Solichin, Abdul, 1997. *Analisis kebijakan (edisi kedua)*, Bumi Aksara, Jakarta
- Winarno, Budi, 2005. *Teori dan proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo, Yogyakarta.
- ,-----, 2008. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*, Media Presssindo, Yogyakarta.
- ,-----, 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses dan Studi Kasus (Edisi dan Revisi Terbaru)*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

Dokumen-dokumen :

- Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Program Pembangunan Rumah Layak Huni Kabupaten Kutim 2014

Sumber-Sumber Internet :

- <http://www.pnpm-mandiri.org> (diakses 24 September 2014).
- <http://www.pnpm-perdesaan.or.id> (diakses 24 September 2014).
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Kemiskinan> (diakses 28 September 20114)
- <http://www.bps.go.id> (diakses 17 Oktober 2014).